TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN MEMBUKA USAHA NIGHT CLUB BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mira Cahya¹, Muhammad Iraqi Fauzi², Adelina Sitanggang³, Tri Bayu Armanda⁴, Fahrysyah Aulya⁵, Nur Hidayah Hasibuan⁶, Dyna M T Pasaribu⁷, Taufiq Ramadhan Amry⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Negeri Medan

miracahya259@gmail.com¹, iraqifauzi@gmail.com², adelinasitanggang694@gmail.com³, bayuarmanda@gmail.com⁴, fahryaulya15@gmail.com⁵, dyahhasibuan392@gmail.com⁶, tpasaribudynam@gmail.com⁷

***ABSTRACT;** This study also identifies the challenges faced by entrepreneurs in complying with regulations, as well as the impact of lack of compliance with the law. This study aims to analyze the legal review of licensing to open a nightclub business in Indonesia based on state administrative law. Night clubs as a place of night entertainment have the potential for significant social impacts, so regulation and supervision through licensing mechanisms are very necessary. The method used in this study is a normative legal approach, which emphasizes the study of relevant laws and regulations and legal documents. Secondary data was collected from primary, secondary, and tertiary legal sources to support the analysis. The results of the study indicate that compliance with licensing regulations, including certification and business permits, is very important to ensure the legality and security of nightclub operations.*

***Keywords:** Licensing, Night Club, State Administrative Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengusaha dalam memenuhi regulasi, serta dampak dari kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap perizinan membuka usaha night club di Indonesia berdasarkan hukum administrasi negara. Night club sebagai tempat hiburan malam memiliki potensi dampak sosial yang signifikan, sehingga pengaturan dan pengawasan melalui mekanisme perizinan sangat diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perizinan, termasuk sertifikasi dan izin usaha, sangat penting untuk menjamin legalitas serta keamanan operasional night club.

Kata Kunci: Perizinan, Night Club, Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi warga negara seluruh negara. Hal ini berarti bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan baik, dengan tujuan untuk terjaminnya kepastian hukum, kesetaraan, demokrasi, dan akal budi.

Administrasi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Administrasi negara adalah keseluruhan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, administrasi negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan usaha club malam.

Hiburan malam menjadi sebuah fenomena sosial yang mendalam dan kompleks yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya dan kehidupan kota. Hiburan malam mencakup beragam aktivitas, termasuk night club, kafe, bar, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang menawarkan hiburan seperti musik, tarian, makanan, dan minuman.

Perizinan salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi negara untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha. Izin diperlukan sebagai bentuk legalitas dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Proses perizinan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan persyaratan dan memberikan persetujuan.

Dalam hukum administrasi negara, pengelolaan night club tidak bisa dipisahkan dari aspek perizinan yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian oleh pemerintah. Perizinan sangat penting, mengingat bahwa usaha night club termasuk dalam kategori usaha yang memerlukan pengawasan ketat akibat potensi dampak sosial yang signifikan. Dengan adanya mekanisme perizinan, pemerintah dapat melakukan kontrol secara preventif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Namun pada praktiknya masih sering ditemukan beberapa diskotik di Indonesia yang melakukan pelanggaran seperti kasus “sky garder kutalimbaru ilegal, Pemprov Sumut tegaskan tidak pernah terbitkan izin usaha”. Dalam kasus ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan, tidak pernah mengeluarkan izin night club atau diskotik untuk sky garden, yang berlokasi di Desa Namurubejulu, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang. Kasus 2 lainnya

tentang pelanggaran terdapat pada kasus “Dki cabut izin usaha diskotek MG cub karena jual narkoba”, dalam kasus ini Pemprov Dki mencabut tanda daftar usaha pariwisata bar dan diskotek MG International club karena memproduksi dan menjual narkoba. Tentu saja hal tersebut menjadi sorotan masyarakat karena mengakibatkan kurangnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar diskotik tersebut. Adapun jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha diskotik tersebut adalah pelanggaran jam operasional diskotik, pengedaran narkotika, sikotropika, prositusi dan perjudian. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha, yang mengatur perizinan berdirinya usaha club malam, maka dari itu kelompok kami ingin membahas bagaimana "Tinjauan Hukum Terhadap Perizinan Membuka Usaha Night Club Berdasarkan Hukum Administrasi".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, 12 berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dikatakan yuridis normatife karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain seperti putusan. Disamping itu juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan Terhadap Perizinan Membuka Usaha Night Club Berdasarkan Hukum Administrasi Negara sebagai sanksi, pertanggung jawaban dan bentuk perlindungan hukumnya. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan- permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan tempat night club di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang bersifat hierarkis, dimulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Dasar pengaturan utamanya terletak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan wajib terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Night Club, sebagai bagian dari industri hiburan yang menawarkan pengalaman yang berbeda dari sekadar bar atau restoran. Dengan fokus pada musik dan tarian, night club menciptakan atmosfer yang energi dan meriah, menarik pengunjung yang mencari hiburan setelah matahari terbenam. Perbedaan mendasar antara klub malam dan bar terletak pada orientasi hiburan; night club mengutamakan pengalaman musik dan tarian dengan DJ sebagai pusat perhatian, sementara bar lebih menekankan pada interaksi sosial dan menikmati minuman dalam suasana yang lebih santai.

Secara hukum, keberadaan night club di Indonesia diatur oleh peraturan daerah (Perda) yang bervariasi di setiap wilayah. Perda ini mencakup aspek-aspek seperti jam operasional, perizinan, batasan usia pengunjung, dan regulasi terkait minuman beralkohol. Perizinan menjadi aspek krusial, memastikan bahwa setiap klub malam beroperasi sesuai dengan standar keamanan dan ketertiban yang ditetapkan. Selain itu, batasan usia diberlakukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konsumsi alkohol dan paparan lingkungan malam yang berpotensi merugikan.

Pengaturan terkait minuman beralkohol juga menjadi perhatian utama, dengan batasan usia pembelian dan jam penjualan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi alkohol dan mengurangi risiko gangguan ketertiban yang mungkin timbul. Lebih lanjut, night club memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum di dalam dan sekitar area mereka. Kehadiran petugas keamanan yang terlatih menjadi penting untuk mencegah potensi konflik atau insiden yang tidak diinginkan.

Dalam konteks sosial night club sering kali menjadi tempat bagi individu untuk melepaskan penat dan mengekspresikan diri melalui tarian dan interaksi sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pengunjung memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menghormati lingkungan sekitar. Dengan demikian, klub malam dapat tetap menjadi tempat hiburan yang menyenangkan dan aman bagi semua orang.

Pada dasarnya tempat night club masuk dalam kategori usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban sehingga memerlukan pengaturan khusus melalui mekanisme perizinan. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur 14

secara lebih spesifik mengenai perizinan tempat night club sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Kewenangan pemberian izin tempat club night secara umum berada di tangan Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa kepala daerah berwenang mengesahkan bentuk perizinan terkait usaha pariwisata, termasuk di dalamnya tempat hiburan malam. Dalam praktiknya, kewenangan ini seringkali didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai implementasi pelayanan terpadu satu pintu di daerah.

Dari perspektif kelembagaan, DPMPTSP menjadi garda terdepan dalam proses penerbitan izin tempat hiburan malam. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, DPMPTSP berperan sebagai front office yang menerima berkas permohonan izin dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Rekomendasi dari Kepolisian menjadi salah satu aspek penting dalam proses perizinan tempat night club. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi Keamanan dalam Penerbitan Izin Operasional Tempat Kegiatan Hiburan, Kepolisian berperan memberikan rekomendasi keamanan sebelum izin operasional diterbitkan.

Sebagai penutup, kerangka hukum perizinan night club di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan serta tuntutan masyarakat. Pergeseran dari pendekatan pengawasan yang ketat (command and control) menuju pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan (risk-based and compliancebased approach) sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan arah perkembangan regulasi ke depan. Namun, mengingat karakteristik tempat hiburan malam yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan keamanan, pengawasan tetap menjadi aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan. Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan

perlindungan kepentingan masyarakat menjadi kunci dalam pengembangan kerangka hukum perizinan tempat hiburan malam yang responsif dan berkelanjutan.

Regulasi Night Club di Indonesia. Industri hiburan malam di Indonesia, terutama night club, telah menjadi bagian dari gaya hidup urban yang semakin berkembang. Namun, seiring dengan popularitasnya, terdapat berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh para pengusaha untuk memastikan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Sertifikasi dan izin usaha merupakan dua aspek penting yang harus dipenuhi sebelum membuka night club di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai regulasi pendirian night club, pentingnya sertifikasi, serta persyaratan izin usaha yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis hiburan malam.

Sertifikasi usaha hiburan malam, termasuk night club, menjadi aspek krusial dalam regulasi pendirian night club di Indonesia. Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi semua standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Tanpa sertifikasi yang sah, night club dapat menghadapi berbagai sanksi, mulai dari penutupan sementara hingga pencabutan izin operasional. Salah satu sertifikasi penting yang harus dimiliki oleh night club adalah Sertifikasi Kelayakan Operasional (SKO). Sertifikasi ini menunjukkan bahwa night club telah memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk beroperasi. Selain itu, Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) juga harus dipatuhi, terutama dalam hal fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pengunjung. Dengan adanya sertifikasi ini, night club tidak hanya menunjukkan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan jaminan kepada pengunjung bahwa tempat tersebut aman dan nyaman untuk dikunjungi. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap pemilik night club

Selain sertifikasi, night club juga memerlukan izin usaha yang sah agar dapat beroperasi secara legal di Indonesia. Proses pengajuan izin usaha night club memerlukan beberapa tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang harus diperhatikan

SITU merupakan salah satu syarat utama untuk mendirikan night club. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat dan berfungsi sebagai izin penggunaan lokasi usaha. Pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi night club tidak melanggar

ketentuan zonasi atau berada terlalu dekat dengan area sensitif seperti tempat ibadah atau sekolah.

Izin Gangguan atau HO diberikan untuk memastikan bahwa night club tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pemerintah akan melakukan penilaian dampak lingkungan serta kebisingan yang dihasilkan dari operasi night club.

Salah satu aspek penting dari night club adalah penyediaan minuman beralkohol. Oleh karena itu, pemilik night club wajib memiliki izin untuk menjual dan menyajikan minuman beralkohol. Izin ini diatur oleh Kementerian Perdagangan serta instansi terkait di daerah. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari Menteri Perdagangan. Terhadap minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang akan diedarkan wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dari barang-barang jualan lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Alkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan 21 cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pendirian night club di Indonesia bukanlah proses yang sederhana. Dengan keharusan mematuhi berbagai regulasi, seperti sertifikasi dan izin usaha, pengusaha night club menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Namun, dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk mematuhi regulasi, night club dapat beroperasi secara legal, aman, dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Sertifikasi dan izin usaha tidak hanya penting untuk memenuhi syarat legalitas, tetapi juga untuk membangun reputasi night club yang baik di mata pengunjung dan pemerintah. Dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku, night

club tidak hanya mengurangi risiko masalah hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan hiburan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Perizinan Berusaha, disebutkan bahwa usaha yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi hukum berupa penutupan tempat usaha, denda, dan pidana penjara. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha night club untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha yang sah sebelum menjalankan usaha.

Usaha night club yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Hal ini karena usaha night club yang tidak memiliki izin usaha dianggap sebagai usaha yang tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha harus memiliki izin dari pemerintah. Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatur usaha night club di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kelab Malam. Peraturan ini mengatur tentang syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha serta sertifikasi bagi usaha night club. Sertifikasi untuk usaha night club, merupakan hal yang sangat penting dalam ketentuan pendirian night club di Indonesia. Sertifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa bisnis tersebut memenuhi seluruh standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam aspek keamanan, kebersihan, maupun kenyamanan. Tanpa sertifikasi yang valid, night club berisiko menghadapi berbagai sanksi, mulai dari penutupan sementara hingga pencabutan izin operasional.

Pada BAB III SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA KELAB MALAM Bagian Kesatu Umum Pasal 5 ayat (1) Setiap Usaha Kelab Malam, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kelab Malam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Kelab Malam, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam Pasal 11 ayat (1) Dalam hal Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kelab Malam yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kelab Malam yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung

sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kelab Malam.

Night club yang tidak memiliki sertifikasi dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pengelola, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Dari risiko sanksi hukum hingga hilangnya kepercayaan dari pelanggan, serta kemungkinan terjadinya kegiatan illegal. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap kelab malam untuk memastikan bahwa mereka memiliki sertifikasi yang diperlukan, agar dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan memenuhi standar yang diharapkan.

Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya untuk mengatur usaha night club di Indonesia dan memastikan bahwa semua usaha club night memiliki izin usaha yang sah serta sertifikasi yang valid. Selain itu, pemilik usaha night club juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa usaha night club di Indonesia dapat beroperasi dengan sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kasus usaha night club yang tidak memiliki izin usaha dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha night club yang tidak memiliki izin usaha. Selain itu, pemilik usaha night club juga harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan bahwa usaha night club di Indonesia dapat beroperasi dengan sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Pemerintah dan pemilik usaha night club harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha club night yang tidak memiliki izin usaha.

KESIMPULAN

Mendirikan dan mengoperasikan night club di Indonesia melibatkan pemenuhan berbagai regulasi yang kompleks, termasuk sertifikasi kelayakan operasional (SKO), standar nasional Indonesia (SNI), serta berbagai izin usaha seperti SITU, HO, izin minuman beralkohol, izin

hiburan dan kesenian, IMB, dan SLF. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan legalitas operasional night club. Meskipun proses perizinan bisa rumit dan memakan biaya, sertifikasi dan izin usaha adalah jaminan bahwa night club beroperasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Regulasi yang ketat memiliki dampak signifikan terhadap industri hiburan malam di Indonesia. Di satu sisi, regulasi membantu menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran hukum, tetapi di sisi lain, dapat menjadi tantangan bagi pengusaha, terutama yang baru memulai usaha. Pemenuhan regulasi ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan aman, menghindari sanksi atau penutupan, dan membangun reputasi yang baik di mata pengunjung dan pemerintah.

Tantangan utama dalam memenuhi regulasi termasuk birokrasi yang rumit, perbedaan peraturan antar daerah, dan biaya yang besar untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan perizinan. Namun, mematuhi semua regulasi memberikan manfaat jangka panjang, termasuk menarik pengunjung, membangun hubungan baik dengan pemerintah, dan meminimalkan risiko terkena sanksi. Selain itu, zonasi dan kebijakan daerah juga harus diperhatikan sebelum memilih lokasi untuk night club.

Kualifikasi staf, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan minuman beralkohol, juga menjadi perhatian penting. Night club yang mematuhi regulasi dan memiliki staf terlatih cenderung memiliki reputasi yang baik, menarik lebih banyak pengunjung, dan membangun kepercayaan dengan otoritas setempat. Dengan demikian, meskipun kompleks, kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberhasilan jangka panjang night club di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaropeboka, Rj. Agung Kusuma. "Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 139–51. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.363>.
- Ilmu, Jurnal, and Akuntansi Volume. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," no. September (2017): 333–48.
- Negeri, Kementerian Dalam. "Permendagri No 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah," no. Mi (2017): 5–24.

- “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “濟無No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Ramadhani, Wahyu, and Farid Farid. “Sanksi Administrasi Bagi Usaha Dunia Malam.” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 5, no. 1 (2023): 2745–47. <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.5013>.
- Santoso, Irsyad, Vicki Dwi Purnomo, Syukron Abdul Kadir, and Benedictus Hestu Cipto Handoyo. “Kudus Regional Regulation Number 10 of 2015 Concerning Discotheque, Night Club, PUB, and Karaoke Entertainment Arrangement Businesses.” *Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya (SOSPOLBUD)* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2865>.